



INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026 – 2029

- Instansi : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah
- Tujuan : Peningkatan PDRB dan Penurunan Jumlah Rumah Tangga Miskin Kelautan dan Perikanan Berbasis Pengelolaan Sdkp yang Berkeadilan dan Berkelanjutan
- Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi
- Fungsi :

1) Perumusan kebijakan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

4) Pelaksanaan administrasi dinas perikanan bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan P2HP dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	1. Nilai Tukar Nelayan	$\frac{\text{Indeks yang diterima nelayan}}{\text{Indeks yang dibayarkan nelayan}} \times 100$	BPS Sulteng	Bidang Perikanan Tangkap dan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil I – VII
	2. Nilai Tukar Pembudidayaan Ikan	$\frac{\text{Indeks yang diterima pembudidaya ikan}}{\text{Indeks yang dibayarkan pembudidaya ikan}} \times 100$	BPS Sulteng	Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP dan UPTD Balai Benih Perikanan
	3. Angka Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun)	$AKI = \sum_{i=1}^n \frac{KIDRT \times WEIND}{JP}$	KKP RI	Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP dan UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan
2. Terwujudnya pengelolaan Sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	4. Rasio Pemanfaatan Kawasan Perairan terhadap total kawasan perairan teritorial	$\frac{\text{Kawasan Lindung Perairan} + \text{Kawasan Pemanfaatan ruang laut}}{\text{Total Luas Perairan teritorial}}$	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil I - VII	Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan UPTD Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Wil I – VII
3. Terselenggaranya Pengawasan SDKP berdasarkan regulasi yang berlaku.	5. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha KP terhadap Peraturan Per UU.	$X = \sum_{i=1}^n \left(\frac{ci}{si} \cdot 100\% \right)$	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Palu, 13 Mei 2026

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



DE YORE M. L. PATIRO, S.H., M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19780525 199703 1 001